Derival : 183/10-110/1983.
Lampiran :
Perival : Data Bangunan/Dokuman Parita Scara Repeda X Repulse den Dokuman Proyek Inpress/Repulse Repulse Re

Bunta , 10 Februari 1983.

Kepalai Kelurah / Dasa

Belem Vileyah Kosmatan Bunta .-

Dengan horast,

Pordamented murat Rapak Rupatd Repula Daerah Tingka II Bonggal tt.
27 Oktober 1982 Nemor. 1 709/AL-200/82 dan murat Susulaniari Repula Dinas
PDK Kabupaten Benggal tt. 28 Januari 1982 Romor.: 1977//.15/85 perihal tersebut diatas, serte sesuai Instruksi komi levet RAKENSepala2 Kalurahan
dan Repula2 Desa tenggal i Februari 1985 di Rusagan Benth Milayah Recemet
an Dunta tentang perihal sebeginang tersebut diatas, ma dengan ini kami
tegaskan kembali agar seterimanya surat ini Sandara Segra, Dungi Sagaramengirimkan Data Bangunan/Dokuman Berita soara dinaksud sesempatan pertama
untuk segera kami teruskan bastas ...

Parlu kani sampoisan ochre Sokumon Grite Aoste ersekufelomet de Lam rangkap 3 (tige), Dua rangkap dikiriskan kepada kmi den Setu rengkap adalah Arsip Sauderez.

Demikian kemi sampsikan untuk dilaksanakan dengar pamuh rasa tanggung jawah dan atas perhatian Saudara menjadi perhatian kemi .--

outer 15/2 by



Tembusan ;

. Yth. Bapak Dupeti Repala Deersh Tingkat II Banggai di Dunak .=

. Yth. Kepels Dinas PDK Kabupaten Banggei di Lunuk .--

A r s 1 p .-

001 N/Bg, 5-07/1x/1902 Pada hour in Raine tgl. I September then feribu sembilan ratus Capan pueluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini man Jabatan : JS M INDIMAN -Jabatan : Frepala Desa Matabas. Alamat Matabas wil Free Bunta relangutnya disebut pihak pertama.

I. Nama . M. K. MONDARFA .-Jabatan Kejonla wilayah Free Bunta Alamat Bunta. selanjutnya disebut pihak kedua.

Titak pertama pada hari dan tanggat tersebut diatas telah menyerah. kan kepada pihak kedua tebidang tanah dengan ukuran 45 y 24 mtr. untuk lokati Gedung fekolah Datar di Deta Matatres dengan Batas-

Sebelah Cetara berbatas dengan prohon? kelapa milik J. Sinelang. Sebelah selatan perbatas dengan prohon? kelapa milik J. Sinelang.

Lebelah Timur berbatas dengan lapangan bola kaki. Limur berbatas dengan pohonz kelapan milik J. Sinolang.

Demikianlah Berita Acara Penyerahan ini kami buat dengan penuh men tunggung jawab untuk Sipergunakan seperlunga.

Jang menerima Pihak kedua; Kepala Wilayah Hee Buntu,

Buntu, 1 September 1902. Jang menyemhkan Pihak pertama: Stepala Desa Matabas, JEM INDIMAN).

(DIS. M.K. MONOARFA).-

Pada han ini Framis, tanggal 10 the Seribu sembilan run delapan puluh dua, kami jung bertanda tungan dibawah i maring-masing:

I. Nama Juliana Sinolana.

Pekerjaan : Tani

Alamat : Toima wil Fee Bunta.

Selanjetnya disebut pihak pertama.

Jabatan : JOHANIS SANDENG Jabatan : Ketua I R. J. M. D.

Alamat : Matabas wil Ree Bunta.

Jelanjutnya ditebut pihak kedua -

Pihak pertama pada hari dan tanggal tersebut diatas telah nyerahkan kepada pihak kedua sebidang tanah dengan uk an 45 x24 mtr untuk lokasi Gedung Sekolah Dasar di Den Matabas dingan batas batas:

Sebelah Utarn berbatas dengan pohon? kelapa 7 Sinclas Sebelah Selatan berbatas dengan pohon? kelapa J. Sincla Sebelah Barat berbatas dengan lapangan bola kaki. Sebelah Timur berbatas dengan pohon? kelapa J. Sinclas Sebelah Timur berbatas dengan pohon? kelapa J. Sinclas

Demikiunlah Berita Acara Penyerahan ini kami buat dengan penech rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sepernya.

Pihok kedua: Jang menerima Fetua I R. F. M.D. Matabas,

The T

(J. SANDENG) .-

Matalons 10 Pebruari 1983. Pihak pertama;
Yang menyerankan

yu li

(JULIANA SINOLANG) .-

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK - KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI

Nomor: 503/258/DPMPTSP/SPD/X/2022

T E N T A N G IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan

Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 1520/421.1/DISDIKBUD Tanggal 22 Juli 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SD NEGERI MATABAS DI DESA MATABAS KECAMATAN BUNTA

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada :

1. Nama Lembaga

SD NEGERI MATABAS

2. Jenis Pendidikan

: Sekolah Dasar

3. Alamat

: Desa Matabas Kecamatan Bunta

4. Pengelola

YOKSEN ENGELBERD KAMBOA, SH

Yayasan/Penyelenggara: Pemerintah Kabupaten Banggai

KEDUA

: Pemegang Izin Wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Luwuk Pada tanggal 28 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAKANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANGGAI

N G G Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19670103 199303 1 011